

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi di sektor publik berkembang semakin cepat setiap harinya. Hal ini merupakan dampak dari penekanan era reformasi terhadap kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang fokus pada daerah. disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pembentukan pemerintahan daerah. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Melalui undang-undang ini, pemerintah mengganti kewenangan terpusat yang dianggap tidak lagi diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, dengan struktur desentralisasi. Akibat diadopsinya era reformasi Seiring dengan kebijakan pemerintahan otonom daerah dan desentralisasi anggaran yang fokus pada kebutuhan daerah, sektor publik tumbuh lebih cepat.

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang keuangan, merupakan akibat dari pergeseran paradigma tersebut. Dengan adanya reformasi regulasi ini diharapkan keuangan daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan ketergantungan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penciptaan standar akuntansi pemerintahan sehingga dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang lebih maju, keadilan, kesetaraan, dan hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan beberapa tanda keberhasilan otonomi daerah. Melalui peraturan perundang-undangan, sebagian kekuasaan

pemerintah pusat dialihkan dengan harapan pemerintahan daerah dapat tumbuh lebih mandiri.

Selain sektor keuangan, terdapat beberapa sektor lain, khususnya sektor pemerintahan daerah, yang bertanggung jawab atas seluruh aspek pertumbuhan. Anggaran mempunyai sejumlah tujuan dalam akuntansi sektor publik, namun perannya sebagai alat perencanaan dan pengendalian adalah yang paling penting. Hal ini memberikan tujuan yang harus dipenuhi pemerintah dalam jangka waktu tertentu sebagai alat perencanaan anggaran. Sementara itu, peraturan ini memberikan batasan tertentu mengenai bagaimana belanja daerah dilakukan sebagai mekanisme kontrol. Anggaran juga dapat menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas pemerintah daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memungkinkan dan memfasilitasi partisipasi (partisipasi) masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk mengelola pembangunan daerah yang benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah, maka daerah sangat membutuhkan pejabat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkaliber tinggi, mempunyai strategi yang beragam dan mampu berpikir secara strategis.

Pentingnya menilai hasil kerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik (uang rakyat) telah dilakukan sebagaimana mestinya (sesuai dengan konsep value for money). Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa realisasi anggaran daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. untuk mengukur efektivitasnya. keuangan di wilayah tersebut.

Rencana operasional pemerintah daerah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencantumkan perkiraan pengeluaran tertinggi untuk membiayai proyek dan kegiatan daerah selama tahun anggaran tertentu serta perkiraan sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. biaya ini. Pajak daerah adalah suatu kewajiban yang harus dibayar kepada suatu daerah oleh seseorang atau suatu badan berdasarkan kekuatan hukum tanpa memperoleh imbalan langsung. Digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 memiliki istilah tersebut. Penduduk suatu daerah wajib membayar pajak atau sumbangan lain yang diwajibkan kepada pemerintah daerah, yang akan digunakan untuk keperluan umum pemerintahan.

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program kerjanya selain membantu pertumbuhan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan, meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menurut Nurcholis (2007:182) adalah uang yang diterima oleh suatu daerah melalui pemungutan pajak daerah yang sah, retribusi daerah, pendapatan usaha daerah, dan lain-lain..

Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menentukan seberapa akuntabel pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efektif, efisien, dan murah serta mampu menunjukkan bagaimana dana tersebut dibelanjakan. Efektif berarti anggaran harus mencapai sasaran atau sasaran kepentingan umum, sedangkan ekonomis mengacu pada pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam kuantitas dan kualitas tertentu pada tingkat harga serendah mungkin (Mardiasmo, 2004:182). Efisien artinya penggunaan dana masyarakat menghasilkan output yang maksimal.

Kinerja keuangan dalam APBD seringkali diabaikan karena selama ini perencanaan APBD hanya memperhitungkan permasalahan anggaran inkremental. Anggaran pendapatan seringkali ditetapkan lebih rendah dari potensi pendapatan yang akan diperoleh dengan harapan pada tahap pelaporan realisasi anggaran, pendapatan aktual akan lebih tinggi dari pendapatan yang dianggarkan, sedangkan anggaran belanja biasanya ditetapkan lebih tinggi dari potensi pengeluaran sebenarnya. realisasinya karena pembelanjaan relatif mudah dilakukan dan rentan terhadap inefisiensi dan kebocoran. Di institusi perusahaan komersial, analisis kinerja keuangan sebagai suatu teknik telah digunakan secara luas; namun demikian, hal ini masih jarang digunakan di lembaga-lembaga publik, khususnya pemerintah kota. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam cara analisis kinerja keuangan dalam menilai keberhasilan keuangan pemerintah daerah. Dengan memeriksa keberhasilan laporan realisasi anggarannya, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi. Laporan Realisasi Anggaran membandingkan anggaran dengan jumlah yang

sebenarnya dibelanjakan selama suatu periode pelaporan. Dengan membandingkan laporan tersebut, Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memperkirakan sumber daya keuangan yang akan diperoleh untuk mendukung operasional pemerintah daerah di masa mendatang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan daerah bidang Penanaman Modal karena Anggaran Belanja daerah digunakan sebagai dasar dalam penerapan pendapatan dan belanja daerah selama periode berlangsung, menghasilkan perkiraan pendapatan dan percepatan, yang mencakup pembuatan perkiraan keuangan untuk perusahaan jika rencana tersebut diadopsi, dan sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Berikut ini Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Tabel 1. 1 Anggaran Realisasi dan Belanja DPMPTSP Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	5.797.818.323.00	5.602.706.261.00	96%
2021	5.360.831.465,00	5.013.748.403,00	93,5%
2022	5.795.115.315,00	5.576.823.269,00	96,23%

Sumber : DPMPTSP Kab.batang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 96%, pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja mengalami penurunan menjadi 93,5% karena terdapat penurunan realisasi belanja pada tahun 2022 realisasi anggaran belanja

mengalami kenaikan sebesar 96,23% dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam meningkatkan anggaran belanja dengan melakukannya upaya dengan peningkatan pelayanan

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja daerah, dan menuangkannya dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “ ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Anggaran Pendapatan Belanja daerah Merumuskan Masalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Realisasi anggaran belanja operasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
2. Bagaimana Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
3. Bagaimana Efektifitas anggaran belanja operasi pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
4. Bagaimana Efektifitas anggaran belanja modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
5. Bagaimana Efisien Anggaran Belanja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah untuk menganalisis)

kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

1. Untuk mengetahui Realisasi anggaran belanja operasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
2. Untuk mengetahui Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
3. Untuk mengetahui Efektifitas anggaran belanja operasi pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
4. Untuk mengetahui Efektifitas anggaran belanja modal pada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?
5. Untuk mengetahui Efisiensi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020-2022?

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Manfaat yang ingin dicapai dalam studi ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (D III) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam kinerja keuangan anggaran pendapatan belanja daerah.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama di kemudian hari.

1.5. Metode Tugas Akhir

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat sebagai dasar penyusunan tugas akhir, penulis melakukan pengumpulan data-data dengan metode sebagai berikut :

1. Sasaran Tugas Akhir

Sasaran tugas akhir merupakan ungkapan yang ditujukan kepada siapa kegiatan atau acara tersebut akan dilaksanakan dalam sasaran di tujukkan untuk pemohon atau masyarakat.

2. Lokasi Tugas Akhir

Lokasi dilakukanya penelitian Tugas Akhir pelaksanaanya dilakukan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Batang, Jl. Urip Sumoharjo No.13.

3. Jenis Tugas Akhir

a. Metode deskriptif

Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan

b. Metode kuantitatif

Merupakan sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Sedangkan Metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Metode Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada karyawan yang berhubungan dengan kinerja anggaran pendapatan belanja daerah

c. Studi Pustaka

Metode studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai,norma dan budaya yang berkembang pada situasi sosial yang akan diteliti ,hal ini dikarenakan penulisan ini tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ini dalam mencari sumber informasi dan sumber referensi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.

1.6.Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas tentang landasan teori yang akan memperkuat dan mendukung pembahasan terhadap judul tugas akhir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini menjelaskan mengenai proses berpikir, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini akan dibahas secara mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, serta hasil analisis yang diperoleh dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima ini berisi kesimpulan atas pembahasan Tugas Akhir, keterbatasan penelitian dan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini